

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung KINERJA PEMERINTAH DI Kota Tangerang Provinsi Banten

Bagus Nugraha Suseno

NPP. 32.0574

Asdaf Kota Tangerang, Provinsi Banten

Program Studi Keuangan Publik

Email: bnugraha213@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riswati, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the problem of regional independence in Tangerang City and the high level of dependence of local governments on subsidies from the central government. **Purpose:** This study aims to analyze regional financial independence in supporting government performance in Tangerang City, Banten Province in 2020 - 2023. **Method:** The method used in this study is descriptive qualitative which is carried out at the Regional Financial Management Agency. This study uses observation, interviews, and documentation for data collection methods. Using data analysis techniques proposed by Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The analysis used uses Mahmudi's theory through the calculation of financial ratios: (1) Independence Ratio. (2) Fiscal Decentralization Degree Ratio. (3) Harmony Ratio. (4) Regional Financial Efficiency Ratio, (5) Regional Financial Effectiveness Ratio. **Result:** The results of this research analysis show that the Regional Financial Independence of the Tangerang City Government when viewed from (1) Independence Ratio, that regional financial performance is categorized as High with a percentage of 75% -100% with a delegative relationship pattern. (2) Fiscal Decentralization Degree Ratio of Regional Finance, that Tangerang City has Good regional financial capability with a percentage of 40.01%-50.00%. (3) Harmony Ratio, that Tangerang City's operational expenditure falls into the Very Harmonious criteria with a spending harmony ratio of 81%-100%. Meanwhile, Tangerang City's capital expenditure falls into the Inharmonious criteria with a spending harmony ratio of 0%-20%. (4) Regional Financial Efficiency Ratio, that Tangerang City's regional financial efficiency is still in the Inefficient category with an efficiency ratio of >40%. (5) Effectiveness Ratio, that Tangerang City's regional financial performance is Very Effective, namely with a criterion of >100%. **Conclusion:** The regional independence of Tangerang City, seen from the overall financial ratio, is said to be independent, only there are several financial performances that need to be optimized. Researchers recommend that the Tangerang City Government maximize regional original income by increasing tax compliance through a transparent digital system, developing new economic sectors, and balancing budget allocations so that more funds are allocated for long-term investments that encourage regional productivity.

Keywords: Regional Financial Independence; Financial Performance; Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemandirian daerah di Kota Tangerang dan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam mendukung kinerja pemerintah di Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2020 - 2023. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk metode pengumpulan data. Menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis yang digunakan menggunakan teori Mahmudi melalui perhitungan rasio keuangan: (1) Rasio Kemandirian. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. (3) Rasio Keserasian. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (5) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang jika dilihat dari (1) Rasio Kemandirian, bahwa kinerja keuangan daerah dikategorikan Tinggi dengan persentase diangka 75%-100% dengan pola hubungan delegatif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan daerah yang Baik dengan persentase diangka 40,01%-50,00%. (3) Rasio Keserasian, bahwa belanja operasi Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Sangat Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 81%-100%. Sedangkan belanja modal Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Tidak Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 0%-20%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, bahwa efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang masih berada dalam kategori Tidak Efisien dengan rasio efisiensi berada diangka >40%. (5) Rasio Efektivitas, bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Sangat Efektif yaitu dengan kriteria >100%. **Kesimpulan:** Kemandirian daerah Kota Tangerang dilihat dari rasio keuangan secara keseluruhan sudah dikatakan mandiri, hanya saja terdapat beberapa kinerja keuangan yang perlu dioptimalkan. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Tangerang untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem digital yang transparan, mengembangkan sektor ekonomi baru, serta menyeimbangkan alokasi anggaran agar lebih banyak dana dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang mendorong produktivitas daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Kinerja Keuangan; Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bagaimana pemerintah daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya daerahnya, termasuk pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Salah satu indikator keberhasilan otonomi adalah kemampuan daerah untuk mencapai kemandirian keuangan, yaitu kemampuan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan temuan Bargain, Caldeira, and Vincent (2025) yang menunjukkan bahwa hanya daerah yang memiliki kapasitas menghasilkan pendapatan asli secara mandiri yang dapat merasakan manfaat nyata dari desentralisasi fiskal, baik dalam bentuk pembangunan lokal maupun peningkatan layanan publik. Menurut Sinurat (2018), keberhasilan otonomi daerah membutuhkan

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan kunci dalam memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik (Pimenta and Seco, 2021).

Kota Tangerang memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, menjadikannya daerah dengan mobilitas ekonomi tinggi di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Meskipun dikenal sebagai daerah yang strategis di Provinsi Banten, Kota Tangerang menghadapi tantangan serius dalam hal ini, yaitu belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah, tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, serta ketidakseimbangan alokasi anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal untuk pembangunan jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan bahwa desentralisasi fiskal belum otomatis menjamin peningkatan otonomi daerah, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah masing-masing. Seperti dijelaskan oleh Muhlisin, Subroto, dan Sakti (2025), desentralisasi justru dapat memperburuk ketimpangan antarwilayah jika kapasitas fiskal lokal tidak merata dan pengelolaan belum efisien. Laporan keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menggunakan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah (Suwanda, 2015). Berikut adalah tabel data keuangan daerah Kota Tangerang Tahun 2020-2023:

Tabel 1.1
Kontribusi PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Total (Rp)	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Total (%)
2020	1.649.002.723.454	3.468.663.446.803	47.5
2021	1.869.216.636.383	4.213.054.524.429	44.4
2022	2.012.220.935.351	4.274.452.905.169	47.1
2023	2.271.392.858.607	4.691.252.495.432	48.4
Rata-Rata	2.050.943.476.780	4.392.919.975.010	46,68

Sumber : LRA Kota Tangerang 2020-2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata hanya sekitar 46,68%, sementara sisanya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara PAD dengan pendapatan total yang mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang masih kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya daerah. Akibatnya, Kota Tangerang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Ketergantungan ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang belum mencapai setengah dari keseluruhan pendapatan. Selain itu, pola belanja daerah cenderung didominasi belanja operasional rutin, dengan porsi belanja modal untuk pembangunan jangka panjang yang relatif kecil. Situasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak pemerintah daerah lain, baik nasional maupun internasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh Haslam McKenzie dan Eyles (2023), pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seringkali terjebak dalam siklus pendanaan jangka pendek dan bergantung pada transfer pusat, sehingga upaya membangun kemandirian fiskal dan investasi jangka panjang membutuhkan kepemimpinan yang inovatif serta strategi penggalian pendapatan asli

yang kreatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi sumber daya lokal belum dimanfaatkan optimal, dan efisiensi anggaran masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana kemandirian keuangan daerah benar-benar mendukung kinerja pemerintahan di Kota Tangerang, sekaligus merumuskan strategi agar ketergantungan fiskal dapat dikurangi di masa mendatang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat kesenjangan antara potensi strategis yang dimiliki Kota Tangerang dengan kenyataan pengelolaan keuangannya. Meskipun berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan memiliki sektor industri, perdagangan, serta jasa yang berkembang pesat, tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, terlihat dari tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, meskipun PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah tetap belum signifikan sehingga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan lokal. Di sisi lain, alokasi anggaran daerah masih lebih banyak terserap untuk belanja operasional rutin dibandingkan belanja modal yang mendukung pembangunan jangka panjang, mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pengeluaran dan rendahnya efisiensi anggaran. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian untuk dianalisis lebih dalam demi merumuskan strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas analisis kemandirian keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Sodik Dwi Purnomo berjudul *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara* (Purnomo and Danuta, 2022) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal membutuhkan waktu untuk berpengaruh nyata. Penelitian Kamilaus Konstase Oki berjudul *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu* (Oki, 2020) menemukan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Belu sangat rendah dengan rata-rata hanya 8,08%, menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada dana transfer pusat, meskipun daerah memiliki potensi sumber daya alam yang belum dioptimalkan. Penelitian Rinaldi Syahputra dalam *Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang* (Syahputra 2017) menemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Aceh Tamiang tergolong rendah, yakni sekitar 4,46%–6,96%, yang berarti pemerintah daerah masih bergantung pada dana pusat, meskipun terjadi sedikit kenaikan PAD setiap tahunnya. Selanjutnya, penelitian Riri S. Putri berjudul *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Putri, 2018) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan di Kota Bandar Lampung rata-rata sudah efektif (90,49%), tetapi tingkat kemandirian dan derajat desentralisasi fiskalnya masih rendah, menunjukkan perlunya optimalisasi PAD agar sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian Sri Wahyuni Febriyanty Gea dalam *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Tahun Tahun 2015–2020* (Gea, 2022) menemukan bahwa rasio efisiensi pemerintah kota masih belum efisien (100,66%) dan efektivitasnya juga tergolong rendah (84,02%), sehingga diperlukan perbaikan pengelolaan anggaran agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mendukung

pembangunan secara optimal. Seluruh penelitian diatas memberikan konteks dan perbandingan yang relevan untuk membantu memahami serta mencari solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian ini berfokus pada kemandirian keuangan daerah dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Tangerang melalui analisis komprehensif terhadap lima rasio keuangan menurut Mahmudi, yaitu Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan dua atau tiga indikator rasio keuangan dan tidak menyentuh aspek strategis seperti ketidakseimbangan belanja operasional dan belanja modal secara terperinci. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berbeda dengan mayoritas penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Fokus pada Kota Tangerang sebagai daerah urban dengan potensi PAD tinggi namun masih menghadapi ketergantungan fiskal, menjadikan penelitian ini relevan untuk menggambarkan dinamika keuangan daerah maju, sekaligus menghadirkan temuan baru tentang hambatan efisiensi dan dominasi belanja operasional.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten pada Tahun 2020–2023 melalui analisis rasio keuangan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kapasitas keuangan daerah serta menyusun rekomendasi guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena kemandirian keuangan daerah dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Tangerang berdasarkan data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2023. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah desain penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau uraian secara detail dan jelas mengenai objek penelitian, tanpa melakukan perlakuan atau intervensi terhadap objek tersebut. Menurut Crowther dan Lauesen (2017), pendekatan kualitatif yang menggunakan bahasa alami, melibatkan sampel kecil yang dipilih secara purposif atau oportunistik, serta berfokus pada individu, peristiwa, atau konteks tertentu, sangat tepat digunakan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang bersifat spesifik. Peneliti mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017) yang meliputi empat tahapan analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang informan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, yang terdiri dari Kepala BPKD, Sekretaris BPKD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Kepala Sub Bidang Akuntansi, dan Staff Penyusun Laporan Keuangan yang terlibat langsung dalam pengelolaan APBD. Observasi dilakukan terhadap implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dokumentasi difokuskan pada Laporan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2020–2023.

Analisis dilakukan menggunakan teori rasio keuangan menurut Mahmudi (2019) yang mencakup lima indikator utama: Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang telah mandiri dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas uraian serta analisis data yang diperoleh baik melalui data primer berupa wawancara dengan informan, maupun data sekunder berupa dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2020–2023. Data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai sejauh mana kemandirian keuangan daerah berperan dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan berbagai faktor yang mendukung dan menghambat kemandirian keuangan daerah, serta menggambarkan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi guna meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD dalam mendanai kebutuhan daerah, serta mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat melalui pajak dan retribusi dalam pembangunan daerah. Menurut Mahmudi (2019), rasio kemandirian dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Perhitungan untuk mengukur rasio kemandirian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019

Kriteria dalam penilaian perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Kriteria Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instuktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014), pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian daerah dapat dibagi menjadi empat tingkatan:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola ini menunjukkan dominasi pemerintah pusat yang kuat terhadap pemerintah daerah.

Dalam pola ini, pemerintah daerah dianggap belum mampu menjalankan otonomi daerah secara finansial, sehingga pemerintah pusat masih memegang kendali yang dominan.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Dalam pola ini, peran pemerintah pusat mulai berkurang, dan pemerintah daerah lebih mampu mengelola otonomi daerah. Pemerintah pusat lebih banyak berperan dalam memberikan konsultasi dan bimbingan terkait pelaksanaan otonomi daerah, karena pemerintah daerah mulai menunjukkan kemampuan finansial yang lebih baik.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pada pola ini, peran pemerintah pusat bergeser dari konsultasi ke partisipasi. Pemerintah daerah dianggap semakin mampu menjalankan otonomi, dan pemerintah pusat berperan sebagai mitra yang memberikan dukungan melalui partisipasi dalam kegiatan daerah.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola ini menunjukkan kepercayaan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi keuangan. Pemerintah daerah dinilai sudah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat mendelegasikan sepenuhnya kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah.

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rasio Kemandirian 2020-2023

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2020	1.649.002.723.454	1.791.519.383.349	92,0%	Tinggi	Delegatif
2021	1.869.216.636.383	2.180.639.862.663	85,7%	Tinggi	Delegatif
2022	2.012.220.935.351	2.261.562.033.794	89,0%	Tinggi	Delegatif
2023	2.271.392.858.607	2.419.084.007.661	93,9%	Tinggi	Delegatif

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.2, Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp1.649.002.723.454 atau 92,0% dari total Pendapatan Transfer, menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Pada tahun 2021, PAD meningkat menjadi Rp1.869.216.636.383 atau 85,7% dari total Pendapatan Transfer. Meskipun rasio kemandirian mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kemampuan keuangan daerah masih tergolong tinggi. Tahun 2022 PAD kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.012.220.935.351, dengan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) mencapai 89,0%. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang semakin mendekati kondisi yang lebih mandiri dalam pembiayaan pemerintahannya. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana PAD naik signifikan menjadi Rp2.271.392.858.607, dengan rasio kemandirian mencapai 93,9%. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Tangerang telah memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik, dengan kemampuan keuangan yang tinggi dan pola hubungan Delegatif yang tetap terjaga.

Tingkat kemandirian keuangan Kota Tangerang pada Tahun 2020–2023 menunjukkan tren yang cukup baik dengan pola hubungan Delegatif. Pada tahun 2020, rasio kemandirian tercatat

92,0%, sempat turun menjadi 85,7% di tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 89,0% di tahun 2022, dan naik signifikan mencapai 93,9% pada tahun 2023. Angka-angka ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang konsisten tinggi meskipun sempat mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kota Tangerang dilihat dari rasio kemandirian sudah tergolong tinggi, yaitu berada dalam rentang 75%–100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai sudah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat mendelegasikan sepenuhnya kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah.

3.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi penggunaan PAD, semakin tinggi pula

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Rumus untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal adalah:

Sumber: Mahmudi, 2019

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tim FISIPOL UGM bahwa skala interval yang digunakan dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval DDF (%)	Kemampuan Keuangan
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Wahyu (2015)

Hasil dari perhitungan skala interval pada rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Semakin besar persentase rasio tersebut, maka pemerintah daerah dianggap semakin baik dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang berarti daerah tersebut lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kurang bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sebaliknya, jika rasio derajat desentralisasi fiskal menghasilkan skala interval yang rendah, pemerintah daerah masih dianggap bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga menunjukkan keterbatasan dalam otonomi fiskal daerah.

Hasil penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang dapat dilihat di tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2020-2023

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DDF	Kemampuan Keuangan
2020	1.649.002.723.454	3.468.663.446.803	47,5%	Baik
2021	1.869.216.636.383	4.213.054.524.429	44,4%	Baik
2022	2.012.220.935.351	4.274.452.905.169	47,1%	Baik
2023	2.271.392.858.607	4.691.252.495.432	48,4%	Baik

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Menurut data yang ditunjukkan pada Tabel 3.4, PAD Kota Tangerang mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp1.649.002.723.454 atau 47,5% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021, PAD meningkat menjadi Rp1.869.216.636.383, meskipun proporsi terhadap total pendapatan daerah sedikit menurun menjadi 44,4%. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan PAD mencapai Rp2.012.220.935.351 atau 47,1% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2023, PAD kembali meningkat signifikan menjadi Rp2.271.392.858.607 dengan rasio terhadap total pendapatan daerah mencapai 48,4%.

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal yang telah dihitung, terlihat bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini ditandai dengan rasio yang berada dalam kisaran 40,01% - 50,00% dan bersifat fluktuatif. Dengan rasio desentralisasi fiskal tersebut, dapat dikatakan pemerintah daerah dianggap semakin baik dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang berarti daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kurang bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Peningkatan PAD yang berkelanjutan ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengoptimalkan sumber daya daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Dengan rasio desentralisasi fiskal yang relatif stabil dan cenderung meningkat, Kota Tangerang memiliki kapasitas yang lebih baik dalam membiayai pembangunan daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

3.3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah melalui proporsi alokasi belanja operasional dan belanja modal. Rasio ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Semakin rendah belanja operasional, semakin besar porsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, tingginya belanja operasional dapat mengurangi ruang fiskal untuk investasi pembangunan. Rumus untuk mengukur rasio keserasian adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019

Rasio keserasian dalam belanja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rasio Keserasian dalam Belanja Keuangan Daerah

Rasio Keserasian Belanja	Kriteria
0% - 20%	Tidak Serasi
21% - 40%	Kurang Serasi
41% - 60%	Cukup Serasi
61%-80%	Serasi
81%-100%	Sangat Serasi

Sumber : Halim (2012)

Rasio belanja operasi dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum memiliki standar atau kriteria ideal yang baku, karena setiap daerah memiliki visi, misi, dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda, serta kebutuhan investasi yang bervariasi untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Rasio belanja modal yang lebih tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan investasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Rasio Keserasian (Belanja Operasi) 2020-2023

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	BO	Keserasian Uang
2020	3.147.357.742.439	3.508.696.005.532	89,7%	Sangat Serasi
2021	3.485.492.467.043	4.127.780.205.111	84,4%	Sangat Serasi
2022	3.769.344.262.814	4.434.781.481.835	85,0%	Sangat Serasi
2023	3.904.618.342.674	4.705.483.322.900	83,0%	Sangat Serasi

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.6, Total Belanja Operasi Pemerintah Kota Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2020-2023. Pada tahun 2020, total belanja operasi tercatat sebesar Rp3.147.357.742.439, kemudian meningkat menjadi Rp3.485.492.467.043 pada tahun 2021. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan total belanja operasi mencapai Rp3.769.344.262.814 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp3.904.618.342.674. Total Belanja Daerah Kota Tangerang juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam Tahun yang sama. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3.508.696.005.532, kemudian meningkat menjadi Rp4.127.780.205.111 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, total belanja daerah kembali naik menjadi Rp4.434.781.481.835 dan mencapai Rp4.705.483.322.900 pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa belanja operasi Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Sangat Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 81%-100%. Pada tahun 2020, rasio keserasian belanja operasi mencapai 89,7%, sedikit menurun menjadi 84,4% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 85,0%, namun turun kembali menjadi 83,0% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki proporsi yang cukup besar terhadap total belanja daerah. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, rasio ini tetap

berada dalam kategori Sangat Serasi, yang menunjukkan bahwa alokasi belanja operasi dalam anggaran daerah Kota Tangerang cukup seimbang dan dikelola dengan baik.

Hasil perhitungan pada Rasio Keserasian (Belanja Modal) Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Rasio Keserasian (Belanja Modal) 2020-2023

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	BM	Keserasian Uang
2020	880.363.219.623	3.508.696.005.532	20,2%	Tidak Serasi
2021	278.145.148.771	4.127.780.205.111	7,9%	Tidak Serasi
2022	555.016.076.281	4.434.781.481.835	13,4%	Tidak Serasi
2023	651.926.316.914	4.705.483.322.900	14,7%	Tidak Serasi

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.7, Total Belanja Modal Pemerintah Kota Tangerang mengalami fluktuasi selama Tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, total belanja modal tercatat sebesar Rp880.363.219.623, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp278.145.148.771. Pada tahun 2022, belanja modal kembali meningkat menjadi Rp555.016.076.281 dan terus mengalami kenaikan hingga Rp651.926.316.914 pada tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal, terlihat bahwa porsi belanja modal terhadap total belanja daerah masih relatif kecil dan berada dalam kategori Tidak Serasi. Pada tahun 2020, rasio keserasian belanja modal mencapai 20,2%, tetapi mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi hanya 7,9%. Pada tahun 2022, rasio meningkat menjadi 13,4% dan sedikit naik lagi pada tahun 2023 menjadi 14,7%.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal, terlihat bahwa belanja modal Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Tidak Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 0%-20%. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang dalam hal belanja modal masih kurang optimal. Rasio belanja modal yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasional, sementara investasi dalam pembangunan aset tetap dan infrastruktur masih terbatas.

3.4. Rasio Efisiensi

Efisiensi dalam konteks keuangan daerah adalah perbandingan antara pengeluaran (*output*) dan penerimaan (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu (Mahmudi, 2019). Suatu program kerja atau kegiatan dikatakan efisien jika mampu memaksimalkan output dengan jumlah input yang telah ditentukan atau dalam istilah lain disebut *spending well*. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menghemat anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Pemerintah daerah dianggap bekerja secara efisien apabila rasio efisiensi anggarannya tidak mencapai atau berada di bawah 100%. Ini berarti bahwa dana yang digunakan telah dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa melebihi anggaran yang tersedia (Mahmudi, 2019). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2019

Tingkat efisiensi pada pemerintah daerah diukur berdasarkan hasil persentase rasio yang dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan pendapatan daerah. Apabila rasio efisiensi melebihi 40%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kegiatan belanja daerah, termasuk penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Optimal dalam hal ini mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran atau input sekecil mungkin, namun tetap menghasilkan output yang maksimal.

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kota Tangerang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 2020-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	REKD	Kriteria
2020	4.368.716.816.016	3.468.663.446.803	101,2%	Tidak Efisien
2021	3.508.696.005.532	4.213.054.524.429	98,0%	Tidak Efisien
2022	4.127.780.205.111	4.274.452.905.169	103,8%	Tidak Efisien
2023	4.434.781.481.835	4.691.252.495.432	100,3%	Tidak Efisien

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang mengalami fluktuasi selama Tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp3.468.663.446.803, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp4.213.054.524.429. Pada tahun 2022, pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp4.274.452.905.169, dan pada tahun 2023 meningkat lebih lanjut menjadi Rp4.691.252.495.432. Realisasi belanja daerah juga menunjukkan pola yang dinamis. Pada tahun 2020, realisasi belanja mencapai Rp4.368.716.816.016, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp3.508.696.005.532. Namun, pada tahun 2022, belanja daerah kembali meningkat menjadi Rp4.127.780.205.111 dan terus naik pada tahun 2023 menjadi Rp4.434.781.481.835.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat bahwa Kota Tangerang masih berada dalam kategori Tidak Efisien dengan rasio efisiensi berada diangka >40%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan kegiatan belanja daerah, termasuk penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Optimal dalam hal ini mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran atau input sekecil mungkin, namun tetap menghasilkan output yang maksimal.

3.5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini memberikan indikasi tentang efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang tersedia. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Secara matematis, rumus rasio efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2019

Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2019

Rasio efektivitas yang dihasilkan dari perhitungan tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, semakin efektif pula pemerintah daerah dalam memobilisasi dan merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber pendapatan, dan rasio yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa potensi PAD telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) Kota Tangerang tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.1
Rasio Efektivitas 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD	Kriteria
2020	1.649.002.723.454	1.464.562.583.407	112,6%	Sangat Efektif
2021	1.869.216.636.383	1.819.161.827.246	102,8%	Sangat Efektif
2022	2.012.220.935.351	1.907.095.449.818	105,5%	Sangat Efektif
2023	2.271.392.858.607	2.202.605.531.310	103,1%	Sangat Efektif

Sumber : BPKD Kota Tangerang (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3.11, realisasi PAD Kota Tangerang pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 1.649.002.723.454. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 1.869.216.636.383. Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi PAD kembali mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 2.012.220.935.351. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana realisasi PAD mencapai Rp 2.271.392.858.607. Anggaran atau target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp 1.464.562.583.407. Tahun berikutnya, pada 2021, target ini naik menjadi Rp 1.819.161.827.246. Peningkatan terus terjadi di tahun 2022 dengan anggaran PAD sebesar Rp 1.907.095.449.818. Pada tahun 2023, target PAD semakin besar, mencapai Rp 2.202.605.531.310.

Berdasarkan hasil perhitungan dan data yang tertera di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang dilihat dari persentase dan kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terbilang Sangat Efektif yaitu dengan kriteria $>100\%$ yang menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengoptimalkan PAD dalam memobilisasi dan merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang mengindikasikan bahwa potensi PAD telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD Kota Tangerang mengalami tren peningkatan yang konsisten selama Tahun 2020–2023 baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Pada tahun 2020, anggaran PAD sebesar Rp1.464.562.583.407 dengan realisasi mencapai Rp1.649.002.723.454 (112,59%) yang menandakan pencapaian sangat efektif. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2021, di mana realisasi PAD sebesar Rp1.869.216.636.383 dari anggaran Rp1.819.161.827.246 (102,75%). Pada tahun 2022 dan 2023, tren positif tersebut terus berlanjut dengan realisasi masing-masing sebesar Rp2.012.220.935.351 (105,51%) dan Rp2.271.392.858.607 (103,12%) dari anggaran yang telah ditetapkan. Tren ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah dan belum mampu secara penuh membiayai kebutuhan belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.

Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian di atas 100% setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan perencanaan pendapatan yang realistis dan pelaksanaan yang efektif. Sebaliknya, rasio efisiensi anggaran berada di atas 90%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dikatakan tidak efisien. Selain itu, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional. Sebagai contoh, pada tahun 2023 belanja operasional mencapai lebih dari 80% dari total belanja, sementara belanja modal hanya sekitar 14%, yang menunjukkan rendahnya proporsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang.

Analisis menyeluruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang menunjukkan temuan utama sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian, bahwa kinerja keuangan daerah dikategorikan Tinggi dengan persentase diangka 75%-100% dengan pola hubungan delegatif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan daerah yang Baik dengan persentase diangka 40,01%-50,00%. (3) Rasio Keserasian,

bahwa belanja operasi Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Sangat Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 81%-100%. Sedangkan belanja modal Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Tidak Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 0%-20%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, bahwa efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang masih berada dalam kategori Tidak Efisien dengan rasio efisiensi berada diangka >40%. (5) Rasio Efektivitas, bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Sangat Efektif yaitu dengan kriteria >100%. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Rinaldi Syahputra (2017) dan Sri Wahyuni Febriyanty Gea (2022), temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun rasio efektivitas Kota Tangerang jauh lebih baik, rasio efisiensinya menunjukkan permasalahan yang serupa, yaitu belum efisiennya pengelolaan anggaran. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa masih banyak daerah, termasuk Kota Tangerang yang menghadapi kendala dalam mencapai efisiensi dan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kota Tangerang menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dan tren peningkatan dalam pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal efisiensi anggaran dan keseimbangan alokasi belanja. Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kemandirian fiskal yang optimal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. BPKD Kota Tangerang diharapkan terus memperkuat strategi pemungutan PAD melalui inovasi digitalisasi, perbaikan sistem pengawasan, serta perluasan sumber pendapatan baru. Selain itu, pengalokasian anggaran perlu diarahkan secara lebih proporsional ke sektor pembangunan produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian keuangan yang lebih ideal.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah temuan penting terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Tangerang. Peneliti mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang secara signifikan memperkuat upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Tangerang, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor pendukung internal mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, di mana pegawai di BPKD Kota Tangerang memiliki kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan kebijakan dan teknologi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem digital melalui aplikasi *Tangerang LIVE* dan *SIMPAD*, telah memudahkan masyarakat dalam membayar pajak secara online, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi penerimaan. Hasil penelitian juga selaras dengan temuan (Allahverdi, M., 2021) tentang pentingnya infrastruktur teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang masif, baik melalui media sosial, seminar, maupun kegiatan langsung ke masyarakat, juga menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Di samping itu, adanya pengelolaan anggaran yang efisien serta kebijakan pemanfaatan aset daerah secara optimal, seperti pelaksanaan kegiatan resmi di dalam wilayah kota, turut membantu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Faktor pendukung eksternal mencakup sejumlah elemen strategis yang berada di luar pemerintah daerah namun memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pertama, tingkat kesadaran wajib pajak yang relatif tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Tangerang, terutama pada sektor PBB, BPHTB, dan pajak restoran yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Kedua, potensi ekonomi yang strategis, mengingat Kota Tangerang

memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, menjadikannya sebagai simpul perputaran ekonomi di sektor industri dan jasa. Ketiga, kolaborasi aktif dengan pihak eksternal, seperti Bank BJB untuk mendukung sistem pembayaran pajak secara digital, serta Kejaksaan dan BPKP dalam penagihan pajak tertunggak dan audit, berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat pengawasan keuangan daerah. Sinergi dari berbagai faktor ini membentuk fondasi yang kuat bagi Kota Tangerang untuk terus mendorong kemandirian fiskal secara bertahap dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Penelitian ini juga mengungkapkan berbagai faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Tangerang. Diantaranya ialah kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, hal ini dikarenakan pendapatan daerah masih bergantung pada sektor jasa dan industri, sementara sektor lainnya seperti pariwisata dan hiburan belum berkembang secara optimal. Selain itu, ketidakserasian belanja modal berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian yang disebabkan total belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan total belanja modal. Rendahnya tingkat efisiensi keuangan daerah yang disebabkan realisasi belanja daerah tergolong lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah yang menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengelola anggaran secara optimal.

Pemerintah Kota Tangerang melakukan berbagai upaya strategis dalam mengatasi hambatan tersebut, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan. Upaya intensifikasi dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak, penagihan aktif, pengawasan lapangan, serta pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi SIMPAD dan Tangerang LIVE untuk mendukung transparansi dan kemudahan pembayaran pajak. Sementara itu, dari sisi ekstensifikasi, pemerintah memperluas jenis dan objek pajak baru, mendorong pengembangan potensi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta melakukan studi komparatif ke daerah lain untuk mengadopsi praktik terbaik. Pemerintah juga menekan dominasi belanja operasional dengan mengarahkan alokasi anggaran ke sektor belanja modal yang lebih produktif, serta menjalin kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Bank BJB, BPKP, dan Kejaksaan dalam penagihan piutang dan penguatan sistem keuangan. Seluruh langkah ini dilakukan untuk meningkatkan PAD, mengefisienkan belanja, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas keuangan daerah dapat mendorong terciptanya kinerja pemerintahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut (1) Rasio Kemandirian, bahwa kinerja keuangan daerah dikategorikan Tinggi dengan persentase diangka 75%-100% dengan pola hubungan delegatif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan daerah yang Baik dengan persentase diangka 40,01%-50,00%. (3) Rasio Keserasian, bahwa belanja operasi Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Sangat Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 81%-100%. Sedangkan belanja modal Kota Tangerang masuk kedalam kriteria Tidak Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 0%-20%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, bahwa efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang masih berada dalam kategori Tidak Efisien dengan rasio efisiensi berada diangka >40%. (5) Rasio Efektivitas, bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Sangat Efektif yaitu dengan kriteria >100%. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Tangerang untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan

meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem digital yang transparan, mengembangkan sektor ekonomi baru, serta menyeimbangkan alokasi anggaran agar lebih banyak dana dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang mendorong produktivitas daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian terbatas pada data Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2023 dan wawancara di lingkungan BPKD, sehingga tidak menjangkau perspektif publik atau sektor swasta.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini disusun sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala BPKD Kota Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Allahverdi, M., Alagöz, A., & Ortakarpuz, M. 2021. *“The Effect of E-Taxation System on Tax Revenues and Costs: Turkey Case.”*
- Bargain, Olivier B., Emilie Caldeira, and Rose C. Vincent. 2025. *“Shine a (Night)Light: Decentralisation and Economic Development in Burkina Faso.”* ODI Working Paper. 187(November 2024):106851. doi: 10.1016/j.worlddev.2024.106851.
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. 2017. *“Qualitative Methods. Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility.”* 225–229.
- Gea, S. W. F. 2022. *“... Rasio Pertumbuhan, Rasio Kesenjangan, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015”*
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Haslam McKenzie, Fiona M., and Suzanne Eyles. 2023. *“Future-Proofing a Local Government Authority for a Post-Mining Future.”* Geographical Research 62(2):293–308. doi: 10.1111/1745-5871.12634.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhlisin, Waspo Tjipto Subroto, and Norida Canda Sakti. 2025. *“How Impact Fiscal Decentralization to Sectoral Change and Local Inequality?”* International Journal of Sustainable Development and Planning 20(1):379–89. doi: 10.18280/ijstdp.200134.
- Oki, Kamilaus Konstanse, Frederic W. Nalle, and Pricilia A. V Meomanu. 2020. *“Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu.”* Jurnal Ekonomi Pembangunan 5(2):1–6.
- Pimenta, Carlos, and Antonio Seco. 2021. *Financial Management Information Systems (FMIS) - Project Guide*.

- Purnomo, Sodik Dwi, and Krisnhoe Sukma Danuta. 2022. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris Di Sumatera Utara." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(1):215. doi: 10.33087/ekonomis.v6i1.513.
- Putri, Riri Septyaningrum. 2018. "Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D. 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Penerbit PPM Indonesia.
- Syahputra, Rinaldi. 2017. "Analisis Derajat Desentralisasi Atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Aceh Tamiang." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(1):12–21.
- Wahyu, G. 2015. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta." Tugas Akhir Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- Yudiaatmaja, Sandy Candra Saputra; I. Wayan Suwendra; Fridayana. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana."